

# Indonesia akan Survei Antibodi Covid-19 Setiap Enam Bulan

Indonesia akan memulai survei antibodi Covid-19 sebagai salah satu kebijakan.

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah mulai melakukan survei antibodi penyakit Covid-19 setiap enam bulan sekali untuk mengetahui tingkat infeksi dan kekebalan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil kebijakan ke depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi

pers mengenai perkembangan situasi pandemi Covid-19 di Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/11), mengatakan, survei antibodi tersebut sudah dilakukan di 34 provinsi dan di 1.000 desa.

Survei tersebut hasil kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam

Negeri, dan perguruan tinggi yang memiliki ahli epidemiologi. Menkes mengatakan survei tersebut diharapkan akan selesai pada Desember 2021.

“Diharapkan Desember ini selesai sehingga kita bisa lihat pekan ketiga atau keempat Desember laporan lengkap dari hasil seroprevalensi survey di seluruh kabupaten/kota, seluruh provinsi di Indonesia. Dan rencananya kita akan lakukan setiap enam bulan, sehingga kita memiliki kontrol dasar pengambilan kebijakan ke

depan,” kata Budi.

Survei antibodi ini dilakukan untuk mengetahui antibodi yang muncul pada masyarakat di suatu daerah.

Antibodi tersebut bisa didapatkan dari vaksinasi ataupun muncul secara alami dari infeksi Covid-19 yang pernah terjadi.

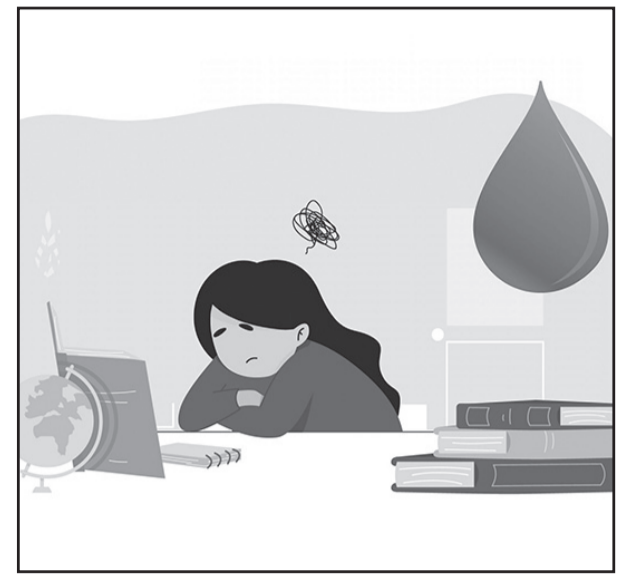
Budi juga mengatakan, saat ini pemerintah terus mendorong vaksinasi lansia untuk terus dilakukan di setiap daerah Indonesia.

Dia menyebut syarat vak-

sinasi sebanyak 50 persen agar suatu wilayah bisa menurunkan level PPKM cukup efektif untuk meningkatkan laju vaksinasi pada lansia.

“Untuk vaksinasi lansia, dulu masih 40 persen yang divaksinasi, sekarang secara total lansia sudah 50 persen. Dan 12 provinsi sudah lebih di atas 50 persen. Sejak angka vaksinasi 50 persen dipakai sebagai syarat naik PPKM, itu jadi kencang sekali,” kata Budi. ● tom

## Anemia Jadi Tantangan Terbesar Masyarakat Dunia



**JAKARTA (IM)** - Sekira 2,3 miliar orang di dunia menderita anemia. Riset Kesehatan Dasar (Riskeddas) 2018 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi anemia sebesar 38,5% pada kelompok usia 0-59 bulan, 32% peningkatan pada kelompok usia 15-24 tahun, 27,2% pada wanita dan 48,9% pada wanita hamil.

Sejumlah satu dari dua penderita yang mengidap anemia diakibatkan karena defisiensi zat besi (IDA). Alhasil gejala yang sering dialami adalah kelelahan, pusing, pucat, dan gangguan kekebalan tubuh yang memengaruhi kualitas hidup dan produktivitas.

Negara di Asia Tenggara dan Afrika memiliki tingkat prevalensi anemia tertinggi yang mewakili 85 persen dari kasus yang dilaporkan secara global. Mengingat masalah anemia yang cukup serius, maka diadakan forum berbagi ilmu kedokteran yang diadakan secara virtual di tujuh negara Asia.

Tema yang diangkat kali ini adalah ‘Mengutamakan kesehatan darah melalui diagnosis dini dan pengelolaan defisiensi zat besi dan mikronutrien’.

Sesi diskusi dipimpin oleh pembicara internasional yang terdiri dari para ahli terkemuka bidang anemia, kesehatan masyarakat, fisiologi zat besi dan kesehatan gizi.

Virtual forum ini membahas berbagai topik yang luas mengenai diagnosis, komunikasi, dan manajemen defisiensi zat besi dan anemia pada pasien.

Topik-topik ini juga dikaitkan dengan pandemi

SARS-COV-2 yang saat ini terjadi di seluruh dunia.

Berdasarkan penelitian terbaru yang menyelidiki potensi peran sel darah merah dan homeostasis besi dalam penanganan klinis Covid-19.

Forum ini menghadirkan berbagai perkembangan terkait pertimbangan fisiologis dan klinis dalam penerapan manajemen pasien di era new normal.

Robert Harding Inaugural Chair in Global Child Health, Hospital for Sick Children and Co-Director of the SickKids Centre for Global Child Health (Kanada), Prof. Dr. Zulfiqar A. Bhutta mengatakan saat ini terdapat cukup bukti mengenai beban yang ditimbulkan dan epidemiologi mengenai anemia dan defisiensi zat besi.

“Pada anak-anak dan wanita usia subur di berbagai belahan dunia, penanganan secara strategis masih sangat lambat dan berdampak dengan hilangnya sumber daya manusia secara signifikan,” terang Bhutta, belum lama. Lebih lanjut Prof Bhutta mengatakan tantangan ini diperparah dengan pandemi Covid-19 dan berbagai konsekuensi ekonomi yang terjadi pada saat ini. Oleh sebab itu, deteksi dini anemia secara menyeluruh dan penanganan yang tepat harus menjadi prioritas global.

“Potensi penuh dari beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan terkait nutrisi, kesehatan dan pembelajaran tidak dapat direalisasikan tanpa penanganan anemia akibat defisiensi zat besi dalam skala besar. Terutama di populasi yang terpinggirkan dan sangat miskin di dunia,” tuntasnya. ● tom

## SAMBUNGAN

MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, UU tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara parlemen.

Anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryaning mengatakan, DPR sangat terbuka untuk melakukan perbaikan atas Undang-undang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut

## Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK...

harus segera ditindaklanjuti agar perbaikan UU Cipta Kerja dapat rampung sebelum tenggat waktu dua tahun yang diberikan MK.

Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu berpendapat, Indonesia tetap memerlukan metode omnibus law sebagai salah satu cara untuk membenahi peraturan perundang-undangan yang ada. Khususnya menyangkut masalah tumpang tindih peraturan, ketidaksihinggaan materi muatan, hyper-regulasi, hingga problem ego sektoral.

### MK Tidak Tegas

Sementara menurut Pelaksana Ketua Umum lembaga Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Viola Reininda sebelumnya menyebut MK tidak tegas dengan putusannya. Hal itu ditandai dengan masih berlakunya UU Cipta Kerja selama dua tahun sampai diperbaiki.

“MK tidak tegas dengan membiarkan UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga setidaknya dua tahun ke depan,” kata Viola dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/11) malam. Viola juga menyayangkan

putusan MK hanya fokus pada aspek pembentukan UU sedangkan aspek materiil belum tersentuh sama sekali. Kata dia, hal ini berpotensi mengakibatkan perubahan hanya terjadi secara parsial di aspek pembentukan UU.

Viola kemudian menyeroi keputusan MK yang melarang adanya pembentukan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Ia menuturkannya, meski MK melarang pembentukan peraturan turunan, setidaknya terdapat 51 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang sudah

## DARI HAL 1

disahkan.

“Dan tetap akan berlaku serta berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk pula aturan turunan yang ditentang publik,” ujarnya.

Viola pun menyayangkan putusan MK tidak memulihkan hak konstitusional para pemohon pengujian formil karena pelanggaran prosedur yang terjadi tidak lantas diinvalidasi.

MK, lanjut dia, tidak menarik korelasi antara proses pembentukan UU yang buruk dapat berimplikasi pada substansi yang buruk. ● mar

## WNI Tak Perlu Lagi Karantina Jika...

mengutip sumber resmi Kementerian Dalam Negeri. Brasil dan Vietnam adalah negara lain yang termasuk dalam daftar negara baru yang diizinkan masuk langsung ke Kerajaan.

Diketahui sebelumnya, semua orang yang datang dari negara-negara ini diharuskan menghabiskan lima hari di karantina institusional, terlepas dari status imunisasi mereka di luar Kerajaan, kata sumber itu.

Sumber kementerian mengatakan bahwa mereka akan terus menerapkan pengecualian kepada negara-negara lain tergantung dari situasi Covid-19 di negara tersebut. Negara-negara yang tersisa yang masih menghadapi larangan perjalanan adalah Turki,

Ethiopia, Afghanistan dan Lebanon.

Sumber Kementerian Dalam Negeri menekankan pentingnya mematuhi penerapan semua tindakan pencegahan dan protokol kesehatan yang telah diambil untuk membanding penyebaran virus corona.

“Semua prosedur dan tindakan tunda pada evaluasi berkelanjutan oleh otoritas kesehatan yang kompeten di Kerajaan, sesuai dengan perkembangan situasi epidemiologis secara global,” kata sumber itu seraya menambahkan bahwa keputusan itu diambil setelah terus-menerus menindaklanjuti situasi pandemi secara lokal dan global.

Pada 24 Agustus lalu, Ke-

menterian Dalam Negeri telah mengeluarkan arahan untuk mengizinkan masuk langsung ekspatriat yang divaksinasi penuh dari negara-negara yang menghadapi larangan perjalanan.

Itu hanya berlaku untuk orang asing yang memiliki izin tinggal yang valid (iqama) dan meninggalkan Kerajaan dengan visa keluar dan masuk kembali setelah mengambil dua dosis vaksin melawan virus corona dari Arab Saudi.

Arab Saudi telah menangguk sementara semua penembangan internasional mulai 15 Maret 2020, menyusul merebaknya pandemi virus corona.

Meskipun penanggukan layanan penerbangan inter-

nasional dicabut setelah satu tahun pada 17 Mei 2021, itu tidak berlaku untuk 20 negara karena situasi virus corona di negara-negara tersebut.

Patut dicatat bahwa Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penanggukan masuknya ekspatriat dari 20 negara ke Kerajaan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk memerangi virus corona, efektif mulai 3 Februari 2020.

Langkah itu membebaskan warga negara Saudi, serta diplomat asing, kesehatan praktis, dan keluarga mereka.

Negara-negara yang terkena penghentian perjalanan adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Indonesia, India, Pakistan, Brasil, Portugal, Turki,

Afrika Selatan, Lebanon, dan Mesir, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Irlandia, Italia, Amerika Serikat.

Kerajaan, Swedia, Konfederasi Swiss dan Prancis. Itu juga diinstruksikan bahwa mereka yang datang dari negara lain memerlukan karantina 14 hari di negara ketiga jika mereka telah melewati salah satu dari 20 negara ini selama 14 hari sebelum aplikasi mereka untuk memasuki Kerajaan.

Kemudian, negara-negara baru Afghanistan, Ethiopia dan Vietnam ditambahkan ke daftar negara terlarang.

Pihak berwenang Saudi akhirnya mencabut penanggukan perjalanan dengan semua negara ini kecuali empat negara yang tersisa. ● mar

## Mantan Menteri KP Edhy Prabowo...

pengadilan tinggi,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (26/11).

“Fakta-faktanya apakah sama dari fakta-fakta dari di pengadilan negeri, ataukah ada fakta-fakta baru atau kah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain atau pun penerapan undang-undang lain seperti tindak pidana pencucian uang,” katanya.

Sementara terkait putusan banding, sejauh ini KPK belum mengambil sikap. Kata Ali, pihaknya masih menunggu sikap dari Edhy Prabowo.

Untuk kemudian mengembangkan kasus Edhy Prabowo ke pasal pencucian uang, kata Ali, pihaknya akan mempelajari putusan banding lebih dulu.

“Nanti kami pelajari dulu putusan secara utuhnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut,” ucapnya.

### Ajukan Kasasi

Edhy Prabowo sudah memutuskan akan mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menghukumnya 9 tahun penjara.

Sementara putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dirinya hanya divonis 5 tahun penjara.

Informasi dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Edhy mendaftarkan permohonan kasasi pada Rabu (17/11).

“Pemohon (Terdakwa) Edhy Prabowo,” demikian dikutip dari situs SIPP PN

Jakarta Pusat, Jumat (26/11).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo menjadi 9 tahun penjara dalam perkara suap ekspor benih bening lobster atau benur.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berbarengan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. Putusan tersebut ditindaklanjuti dari banding yang diajukan oleh pihak Edhy Prabowo.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 ta-

hun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” dikutip dari laman Mahkamah Agung, Kamis (11/11).

Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun juga menambatkan hukuman pengganti.

Dimana jika Edhy tidak dapat membayar uang pengganti senilai Rp 9,6 miliar dan US\$ 77.000 diganti dengan hukuman yang semula 2 tahun kurungan menjadi 3 tahun kurungan.

Terkait pencabutan hak politik, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama dengan pengadilan tingkat pertama yakni berupa pencabutan hak untuk

dipilih dalam Jabatan Publik selama 3 tahun sejak Edhy selesai menjalani pidana pokoknya.

Dalam sidang tersebut duduk sebagai Hakim Ketua Majelis yakni Haryono, dan Mohammad Lutfi, Singgih Budi Prakoso, Renny Halida Ilham Malik, Anthon R Saragih masing-masing sebagai Hakim anggota.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Edhy juga dijatuhkan hukuman untuk membayar denda Rp400 juta subsidair enam bulan kurungan. ● mar

## Waspada! Strain Covid yang Lebih Buruk...

dengan enam kasus terdeteksi di Afrika Selatan, dan satu lagi kemudian terdaftar di Hong Kong, menurut laporan media Inggris.

Pasien Hong Kong baru-baru ini melakukan perjalanan ke Tiongkok dari Afrika Selatan, membuat para ilmuwan sangat waspada, karena varian baru dapat menyebar ke mana saja melalui perjalanan internasional. Pasien tersebut juga dikatakan telah divaksinasi ganda.

Berita tentang strain baru, yang dikenal sebagai B.1.1.529 ini dibagikan oleh ahli virologi Departemen Penyakit Menular Imperial College London Tom Peacock.

Dia memperingatkan bahwa varian ini “lebih buruk secara antigen daripada hampir semua hal lainnya.”

Peacock mengatakan bahwa strain baru, yang kemungkinan akan dinamakan varian ‘Nu’ ini memiliki “cabang yang sangat panjang dan profil

mutasi duri-duri yang buruk”, memperingatkan kemunculannya harus dipantau dengan ketat.

Sisi baiknya, menurut para peneliti, tingginya jumlah mutasi bisa berarti variannya tidak stabil, yang mungkin mencegahnya menyebar luas.

Sejauh ini, Covid-19 telah membunuh lebih dari lima juta orang di seluruh dunia, dengan lebih dari 259,5 juta terinfeksi.

**Tutup Perjalanan dari Afsl**

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mendesak pemerintah untuk menutup perjalanan dari Afrika Selatan dan negara-negara lain yang teridentifikasi memiliki kasus virus Corona varian B.1.1.529.

“Saya pikir, hal ini penting untuk dilakukan sebagai upaya tindakan pencegahan rakyat Indonesia dari varian virus baru Covid-19,” kata

Dasco, dalam siaran pers, Jumat (26/11).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan, berdasarkan informasi yang ia terima, varian baru ini dapat bermutasi dua kali lipat lebih banyak dari pada jumlah mutasi pada varian Delta.

Oleh karena itu, Dasco menilai, pemerintah mesti mengambil langkah tegas agar varian B.1.1.529 yang lebih ganas dari varian Delta tidak masuk ke Indonesia. ● mar

## Astaga! Seorang Anak Tega Jual...

Dalam bekerja sebagai ART, di Kapanewon, Kasihan, Bantul, NP hanya pulang dua bulan sekali untuk menengok rumah dan sekaligus memberi angsuran utang suaminya.

Sementara anak semata wayangnya yang yang tinggal dirumahnya dibelikan sepeda motor untuk bekerja sebagai driver ojek online. Ibunya menyuruh DRS menjaga rumah selama ia bekerja.

Namun ternyata amanah tersebut tidak dijalankan oleh anaknya, yang justru menjual

seluruh perabot rumah tangga yang berada di rumah.

Selain menggadaikan sepeda motornya, DRS juga menjual sejumlah lemari dan beberapa daun pintu serta dipan di rumahnya. Uang penjualannya digunakan untuk membelikan hadiah bagi seorang wanita yang dikenalnya sejak sebulan lalu.

Ketika uang hasil penjualan seluruh perabot rumah tangga sudah habis dan tak ada lagi yang bisa dijual, DRS akhirnya menjual seluruh genting

yang masih terpasang di atap rumahnya.

Seorang tetangga yang melihat genting rumah milik NP diturunkan dan dimasukkan ke dalam truk, mencoba menghubungi NP yang kemudian pulang ke rumah.

Tak terbayangkan betapa kagetnya dirinya ketika melihat seluruh genting rumahnya sudah diturunkan dan seluruh perabot rumah tangga di rumahnya telah lenyap.

Ia pun marah karena kelakuan anaknya yang men-

jual perabot rumah tangga dan melaporkannya ke kantor polisi.

Sang ibu berharap agar sang anak bisa berubah menjadi lebih baik setelah berurusan dengan hukum.

“Semoga anak saya bisa lebih baik kalau sudah dihukum,” ujar NP, Rabu (24/11).

Ketika mendapat laporan adanya kasus pencurian yang melibatkan ibu dan anak kandung, polisi sudah berusaha melakukan mediasi antar keduanya.

Namun sang ibu tetap bersikeras untuk melanjutkan laporannya ke kantor polisi.

Meski sudah menahan DRS, namun mengingat kasus ini merupakan delik aduan, polisi masih memberi kesempatan jika sang ibu hendak mencabut laporannya.

Dalam kasus tersebut, polisi akan menjerat DRS dengan ancaman Pasal 357 tentang pencurian dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara selama lamanya 5 tahun penjara. ● osm

## SAMBUNGAN

## Polisi Sita Rp8,9 Miliar Terkait Dugaan Korupsi...

dokumennya telah dilengkapi, namun tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang/jasanya yang diduga melanggar SOP.

Sementara barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserahkan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran.

“Barang hasil pekerjaan tidak pernah diserahkan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran ini berdampak pada kerugian,” kata Zulpan.

Atas perbuatannya, Pasal yang bakal disanggakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” ujar Zulpan. ● mar

## InternationalMedia

**PEMIMPIN REDAKSI:** Osmar Siahaan  
**PELAKSANA HARIAN:** Lusi J, Prayan Purba.  
**PENANGGUNG JAWAB:** Bambang Suryo Sularso.  
**KORDINATOR LIPUTAN/FOTO:** Sukris Priatmo.  
**REDAKSI:** Frans G, Vitus DP, Berman LR, Bambang Suryo Sularso.  
**ARTISTIK:** M Rifki, James Donald, Indra Saputra.  
**SIRKULASI-PROMOSI:** A Susanto, Nurbayin, Slamet, Ahyar, Ferry.  
**AGEN:** JOGJA (Hidup Agency), PADANG (Karel Chandra), PALEMBANG (Angkasa), SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen). **PANGKAL PINANG** (Yuliani, John Tanzil), **BALIK-PAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **LAMPUNG** (Kartika), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.  
**KEUANGAN/IKLAN:** Citta.  
**BIRO BOGOR:** Subagyo (Kepala Biro), Jaidarman.  
**BIRO TANGERANG:** Johan (Kepala Biro).  
**BIRO BEKASI:** Madong Lubis (Kabiro).  
**BIRO SEMARANG:** Tri Untoro.  
**BIRO BANDUNG:** Lyster Marpaung.  
**BIRO BANTEN:** Drs H Izul Jazuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).  
**BIRO LEBAK:** Nofi Agustina (Kabiro).  
**BIRO JAMBI:** Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.  
**HARGA ECERAN:** Rp 2.500,-/leks (di luar kota Rp 3.000,-/leks), Harga Langganan Rp 50.000,-/Bulan.  
**PERCETAKAN:** PT. International Media Web Printing  
**ALAMAT:** Jl. Kapuk Kamal Raya No. 40-A, Jakarta Barat. (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3  
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720  
 Telp : 021-6265566 pesawat 4000  
 Fax : 021-639 7652.  
 Twitter: InternationalMedia @redaksi\_IM